

Strategi Defensif China dalam Merespon Kebijakan Amerika Serikat atas Taiwan

Dion Maulana Prasetya¹

Abstract

US arms sale to Taiwan is a driving force to understand the relationship between United State and People's Republic of China (PRC). Under the Taiwan Relations Act, the US could provide arms aimed for Taiwan defensive purposes. This is aiming to protect Taiwan from any possibility of unilateral acts by China. This US policy has a strong impact to China, who consider Taiwan as a renegade province of the Mainland. For China, Taiwan's status is already final and cannot be changed, that is a part of PRC and would never get his de jure independence. A big number of US Arms Sale to Taiwan, like occurred in the early 2010, therefore, viewed by China as a support for Taiwan independence. This paper shows us that the US military capability is the main variable why the strategy of China in response to arms sale to Taiwan policy is defensive. According to offense-defense, nowadays the best choice for China is defense – defense has advantages – not the offensive one. By using of force to reunify Taiwan, means has no advantage for China, since that could provoke the US to intervene, just like in 1995-1996 crisis. The US military capability which is much more stronger than China's, is the main factor of defensive strategy.

Keywords: Arms Sale, Deterence, Offense-defense, Military Capability, Taiwan Relations Act.

Abstraksi

Penjualan senjata oleh Amerika Serikat kepada Taiwan merupakan salah satu driving force untuk memahami hubungan China-AS. Di bawah kerangka perjanjian Taiwan Relations Act, Amerika Serikat berhak untuk menyediakan persenjataan untuk tujuan pertahanan bagi Taiwan. Hal ini dilakukan AS untuk melindungi Taiwan dari kemungkinan tindakan unilateral China. Kebijakan AS ini sangat mempengaruhi China, yang menganggap bahwa Taiwan merupakan salah satu propinsi yang memberontak dari Tanah Air. Bagi China, status Taiwan telah final dan tidak dapat dirubah, yaitu merupakan bagian dari Republik Rakyat China, dan tidak akan pernah memperoleh kemerdekaan secara de jure. Sehingga kebijakan AS menjual persenjataan dalam jumlah besar, seperti yang terjadi pada tahun 2010, dipandang oleh China sebagai dukungan untuk kemerdekaan Taiwan. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa kapabilitas militer Amerika Serikat merupakan variabel utama mengapa strategi China dalam merespon penjualan senjata ke Taiwan bersifat defensif. Saat ini pilihan yang menguntungkan bagi China adalah bertahan, bukannya menyerang. Pilihan untuk memaksa penyatuan dengan Taiwan hanya akan merugikan China, karena akan memancing reaksi AS, seperti yang terjadi pada krisis tahun 1995-1996. Kapabilitas militer China yang berada di bawah AS, menjadi pertimbangan utama strategi defensif.

Kata kunci: Penjualan senjata, Deterens, Offense-defense, Kapabilitas militer, Taiwan Relations Act.

¹ Alumnus Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), bisa dihubungi via email: dionprasetya@rocketmail.com.

Pendahuluan

Wacana keilmuan Hubungan Internasional pasca Perang Dunia II didominasi oleh para kaum realis. Pada tahun 1958, A.F.K Organski merumuskan teori *Power Transition*, yang menjadi *oposite* dari *Balance of Power*. Dalam *World Politics*, ia menyimpulkan bahwa hubungan antara *balance of power* dan perdamaian tidak bisa dipertahankan. Periode keseimbangan, menurut Organski, nyata atau bayangan, merupakan periode peperangan. Klaim utama *power transition* adalah bahwa kemungkinan perang meningkat di waktu periode transisi kekuasaan. Sebaliknya, periode damai adalah periode di mana terdapat satu pihak yang menggenggam kekuasaan penuh, bukannya keseimbangan di antara dua pihak.²

Klaim tersebut seperti mendapat “angin segar” ketika periode damai pasca perang diwarnai oleh perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh Uni Soviet³ dan menurunnya hegemoni ekonomi politik Amerika Serikat (selanjutnya disebut AS) sepanjang dekade 1970-an. Penurunan hegemoni AS ditandai oleh perbaikan dan peningkatan penyatuan Eropa serta pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat.⁴ Lebih lanjut, kepemimpinan hegemonik seperti ini tidak akan muncul melalui AS atau negara lain pada paruh kedua abad 20, karena kekuatan hegemonik, sepanjang sejarah, hanya muncul setelah perang dunia.⁵

Memasuki abad ke 21, perdebatan di antara penganut kedua teori di atas tidak mengalami penurunan. Para sarjana Hubungan Internasional menjadikan kawasan Asia Timur sebagai “lambung” riset mereka, seiring dengan berakhirnya Perang Dingin dan meningkatnya perekonomian serta militer Republik Rakyat China.⁶ Peningkatan kapabilitas RRC dan pengaruhnya terhadap AS, menjadi sorotan utama para sarjana Hubungan Internasional maupun pengambil kebijakan. Sebagian berpendapat, peningkatan kemampuan RRC merupakan perilaku perimbangan terhadap AS, sehingga memunculkan *bipolar balance of power* di Asia Timur, menggantikan segitiga *great power* selama masa Perang Dingin.⁷ Sebagian berpendapat bahwa peningkatan kemampuan RRC merupakan tanda-tanda transisi kekuatan di abad 21, di mana AS sebagai kekuatan tunggal global pasca Perang Dingin ditantang oleh RRC sebagai kekuatan dunia yang baru.⁸

Terlepas dari kedua teori di atas, hubungan China dan AS memang terus mengalami fluktuasi – bahkan sampai saat ini ketika AS dipimpin oleh Barrack Obama. Peningkatan kemampuan China dan meningkatnya rasa nasionalisme rakyat China, menjadi dua faktor utama yang mempengaruhi stabilitas hubungan di antara kedua negara.⁹ Di dalam kedua

² A.F.K Organski, “World Politics” dalam John A. Vasquez, *Classics of International Relations*. New Jersey: Prentice Hall, 1996, hlm. 303-306.

³ Klaim Organski dibuat ketika memasuki masa Perang Dingin. Di dalam *World Politics*, Organski menulis, “...Jika sejarah terulang, maka perang dunia selanjutnya akan dimulai oleh Uni Soviet, dan perang akan dilancarkan sebelum Uni Soviet sekuat AS dan sekutunya...” Baca A.F.K Organski dalam *Ibid*, hal 306.

⁴ Robert O. Keohane, *After Hegemony*, Princeton: Princeton University Press, 1984, hlm. 9.

⁵ *Ibid*.

⁶ Banyak literatur yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi RRC. Hanya untuk menyebut salah satu di antaranya adalah, K. C. Yeh, “China’s Economic Growth: Recent Trends and Prospects” dalam Shuxun Chen and Charles Wolf, Jr. (Ed.), *China, The United States, and The Global Economy*, California: RAND, 2001, hlm. 69-97. Sedangkan untuk peningkatan militer, bisa dibaca di bab ketiga dari Evelyn Goh and Sheldon W. Simon (Ed.), *China, The United States, and Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, and Economics*, New York: Routledge, 2008.

⁷ Robert S. Ross, “Bipolarity and Balancing in East Asia” dalam T.V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann (Ed.), *Balance of power: theory and practice in the 21st century*, California: Stanford University Press. 2004, hlm. 267.

⁸ Zhiquan Zhu, *US-China Relations In The 21st Century : Power Transition and Peace*, New York: Routledge, 2006.

⁹ Yan Xuetong, “The Instability of China-US Relations”, *The Chinese Journal of International Politics*, Vol. 3, 2010, hlm. 263–264.

faktor tersebut, permasalahan reunifikasi Taiwan menjadi salah satu *driving force* dalam memahami hubungan China-AS.¹⁰ Melalui *Taiwan Relations Act* (TRA), AS menerapkan strategi deterens untuk melawan perilaku unilateral *People's Liberation Army* (PLA atau angkatan bersenjata China) terhadap Taiwan.¹¹

Hubungan di antara AS dan China dapat kita bagi menjadi empat bagian/periode: 1950-1970, 1971-1977, 1978-1988, dan 1988-2009. Pada periode 1950-1970, hubungan AS-China masih tegang karena dipengaruhi oleh Perang Korea, namun relatif tidak mengalami fluktuasi. Menginjak periode kedua, hubungan keduanya berada pada titik tolak menuju normalisasi hubungan – yang ditunjang oleh membaiknya hubungan China dengan AS, karena sengketa batas wilayah dengan Uni Soviet pada tahun 1969. Periode ketiga merupakan periode normalisasi yang ditandai dengan dibukanya kembali hubungan diplomatik pada tanggal 1 Januari 1979. Periode ke empat, yang ditandai oleh peristiwa Tiannanmen pada tahun 1989, mengantarkan AS-China pada pola hubungan paling fluktuatif.¹²

Pada periode terakhir, hubungan AS-China pernah mencapai titik terburuk. Pada masa kepemimpinan George H. W. Bush tahun 1992, AS menjual 150 buah pesawat F-16 kepada Taiwan. Hal tersebut merupakan nilai penjualan senjata ke Taiwan terbesar sepanjang sejarah.¹³ Selain itu pada bulan Maret 1996 terjadi ketegangan di selat Taiwan – karena gelaran senjata yang dilakukan China untuk memprovokasi pemilu presiden pertama di Taiwan. Satu misil meledak hanya berjarak 23 mil dari pelabuhan Taiwan. Tindakan provokasi China itu disebabkan oleh pemberian visa oleh AS untuk menghadiri undangan reuni Universitas Cornell terhadap pemimpin politik, yang juga calon presiden Taiwan, Lee Teng Hui. Beijing menganggap kebijakan AS memberikan visa kepada Lee Teng Hui sebagai dukungan terhadap kemerdekaan Taiwan.¹⁴

Memasuki abad 21, transfer persenjataan tidak berhenti. Pemerintahan Obama menyetujui rencana penjualan senjata ke Taiwan sebesar 6,4 milyar dolar AS. Jumlah itu terdiri dari 114 misil Patriot sebesar 2, 81 milyar dolar, 60 helikopter Black Hawk senilai 3,1 milyar dolar dan selebihnya (340 juta dolar) peralatan komunikasi untuk pesawat F-16 pesanan Taiwan.¹⁵ Penjualan senjata ke Taiwan tersebut menciderai *Joint Communique 1982* yang berisi tentang pengurangan penjualan senjata ke Taiwan. Beijing tidak merespon kebijakan tersebut secara koersif, seperti yang terjadi pada tahun 1996. Meski begitu pemerintah China tetap melayangkan protes keras kepada pemerintah AS,¹⁶ menerapkan

¹⁰ Baca bab 8 dari C. Fred Bergsten (et.al), *China's Rise: Challenges and Opportunities*, Washington D.C: Peter G. Peterson Institute for International Economics and the Center for Strategic and International Studies, 2008.

¹¹ Yong Deng, *China's Struggle for Status*, New York: Cambridge University Press, 2008, hlm. 251.

¹² China's Foreign Relations with Major Powers by the Numbers 1950–2005, Beijing: Gaodeng jiaoyu chubanshe, 2010, pp. 21–23 dalam Yan Xuetong, “The Instability of China-US Relations...”, hlm. 269.

¹³ David Lai, “Arms Sales To Taiwan: Enjoy The Business While It Lasts”, *Of Interest Strategic Studies Institute*, May 3, 2010, hlm. 3.

¹⁴ Robert S. Ross, “The 1995-1996 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, Credibility, and Use of Force”. *International Security* 25:2 (Fall 2000), hlm. 87-123.

¹⁵ “China hits back at US over Taiwan weapons sale”, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8488765.stm>, diakses tanggal 22 Oktober 2010.

¹⁶ Helene Cooper, “U.S. Approval of Taiwan Arms Sales Angers China”, <http://www.nytimes.com/2010/01/30/world/asia/30arms.html>, diakses tanggal 22 Oktober 2010.

sanksi terhadap perusahaan persenjataan AS¹⁷ dan menambah misil jarak jauh di selat Taiwan.¹⁸

Secara kuantitatif pola hubungan di antara AS dan RRC memang mengalami fluktuasi, tetapi secara kualitatif hampir tidak mengalami perubahan. Masing-masing mengejar kepentingan nasional, dan menerapkan kebijakan “pura-pura menjadi teman”. Hal tersebut seperti yang disampaikan Yan Xuetong:

*“The false-but-nice description of China–US strategic relations started in the mid-1990s... To arrest the downward spiral of bilateral relations and reduce the possibility of confrontation, China and the United States looked for ways of showing their good will. Officials in both the Chinese and American governments searched for an ambiguous term to cloak their uneasy relationship and finally agreed on the phrase neither-friend-nor-enemy (fei di fei you). Both governments used the term to define their relationship, and it became widely accepted by experts in both countries.”*¹⁹

Bagi China, Taiwan memiliki arti yang sangat penting dan strategis, sehingga kepentingan untuk reunifikasi tidak dapat ditawar lagi. Kehilangan Taiwan akan memberikan implikasi yang mendalam dan cukup kompleks bagi China. Deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan dianggap setara dengan deklarasi perang. Jika pemerintah China gagal mempertahankan Taiwan, maka hal itu akan memicu pemberontakan serupa di Tibet, Xinjiang dan beberapa tempat lainnya.²⁰ Bagi para elit China, lepasnya Taiwan berarti kelemahan China, sedangkan bersatunya Taiwan berarti kekuatan China. Hal senada juga diungkapkan oleh Yan Xuetong, direktur Institute of International Studies Universitas Tsinghua, *“If China lacks the ability to preserve national unity, it cannot rise to be a world power, nor can it achieve national rejuvenation.”*²¹ Perasaan serupa tidak hanya ditunjukkan oleh para elit dan juga akademisi tetapi juga muncul di kalangan masyarakat China Daratan, yang menganggap kebangkitan China tidak nyata dan tidak akan ada artinya, jika pemerintah gagal menyatukan kembali Taiwan dengan China.²²

Ambisi China untuk merangkul kembali Taiwan terhambat oleh kehadiran AS. *Mindset* Perang Dingin tetap dihidupkan oleh AS dengan terus menyuplai persenjataan kepada Taiwan dalam jumlah besar. Hal itu dilakukan AS untuk menangkal perilaku agresif China dalam upaya melakukan reunifikasi dengan Taiwan. *Sino-American Mutual Defense Treaty* yang telah dijalin oleh AS-Taiwan semenjak 1954 digantikan oleh *Taiwan Relations Act* (TRA) pada tahun 1979. Melalui TRA ini AS tetap dapat menjalin hubungan non-formal dengan Taiwan, seperti hubungan perdagangan, kebudayaan dan hubungan non-formal lainnya.

Taiwan Relations Act (TRA) sebagai Strategi Deterrens AS

Sebagian pengamat menyimpulkan bahwa AS menerapkan strategi *deterrence* kepada China agar tidak menggunakan serangan militer kepada Taiwan. Kepentingan AS dalam kasus ini terbatas pada kepentingan reputasional. AS berniat mencegah (to deter)

¹⁷ “China hits back at US over Taiwan weapons sale...”

¹⁸ Ralph Jennings, *China adding missiles near Taiwan: navy official*, <http://www.reuters.com/article/2010/03/27/us-taiwan-china-idUSTRE62Q0AS20100327>, diakses tanggal 22 Oktober 2010.

¹⁹ Yan Xuetong, “The Instability of China-US Relations...”, hlm. 267.

²⁰ Robert Ross, “Navigating the Taiwan Strait: Deterrence, Escalation Dominance, and U.S.-China Relations”, *International Security*, Vol. 27, No. 2 (Fall 2002), hlm. 48–85.

²¹ Yong Deng, *China’s Struggle for Status...*, hlm. 256-257.

²² Wang Jisi, *China’s Changing Role in Asia*, Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2004, hlm. 14. Diakses melalui http://www.jcie.org/researchpdfs/RiseofChina/RiseChina_Wang.pdf, diakses tanggal 15/02/2012.

China menyerang Taiwan untuk menjaga kredibilitasnya dalam usaha menjaga keamanan regional.²³ Strategi ini secara eksplisit tertuang di dalam kerangka perjanjian *Taiwan Relations Act*. Mantan presiden AS George W. Bush mengatakan bahwa kebijakan AS didasarkan atas prinsip tidak ada penggunaan serangan militer oleh China kepada Taiwan. Lebih lanjut Bush menekankan, “...all issues regarding Taiwan's future must be resolved peacefully and must be agreeable to the people of Taiwan. If China violates these principles and attacks Taiwan, then the United States will respond appropriately in accordance with the *Taiwan Relations Act*. America will help Taiwan defend itself.”²⁴ Bahkan di salah satu interview dengan televisi nasional, Bush menyatakan akan melakukan apa saja untuk melindungi Taiwan.²⁵

Perjanjian Taiwan Relations Act (TRA) dimulai pada tanggal 10 April 1979, tiga bulan setelah dibukanya hubungan diplomatik penuh antara AS dan China tanggal 1 Januari 1979. Perjanjian tersebut menandakan bahwa hubungan, selain diplomatik, di antara AS dan Taiwan tidak berakhir, dengan diakuinya hanya ada satu China melalui Shanghai Communiqué pada tanggal 28 Pebruari 1972. Melalui TRA, AS tetap menjalin hubungan perdagangan, kebudayaan dan berbagai hubungan yang tidak resmi lainnya. Di bawah TRA, AS menjalankan kebijakan: (1) Memelihara dan mengembangkan hubungan kultural, perdagangan dan lainnya secara ekstensif dan bersahabat di antara AS dan rakyat Taiwan, (2) Mendeklarasikan perdamaian dan stabilitas di area kepentingan politik, keamanan dan ekonomi AS dan di area yang menjadi perhatian internasional, (3) Memperjelas masa depan Taiwan akan ditentukan oleh cara-cara damai; menganggap bahwa usaha-usaha yang menentukan masa depan Taiwan, selain cara-cara damai, termasuk boikot atau embargo, merupakan ancaman keamanan dan perdamaian bagi negara-negara Pasifik Barat dan menjadi perhatian penting bagi AS, (4) Menyediakan persenjataan *defensive* untuk Taiwan, (5) Meyakinkan hak untuk melawan segala macam bentuk serangan atau koersi yang akan mengancam keamanan atau sistem ekonomi dan sosial rakyat Taiwan.²⁶

Di dalam pasal 3 TRA tertuang poin penting, bahwa AS berhak menjual persenjataan kepada Taiwan untuk maksud pertahanan diri, sesuai jumlah yang dibutuhkan.²⁷ Itulah yang menjadi landasan AS untuk menjual persenjataan dan perlengkapan militer lainnya kepada Taiwan dalam jumlah yang relatif besar. Pada awal tahun 2010 pemerintahan Obama menyetujui rencana penjualan senjata ke Taiwan sebesar 6,4 milyar dolar AS. Jumlah itu terdiri dari 114 misil Patriot sebesar 2, 81 milyar dolar, 60 helikopter Black Hawk senilai 3,1 milyar dolar dan selebihnya (340 juta dolar) peralatan komunikasi untuk pesawat F-16 pesanan Taiwan.²⁸ Pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan artikel dan servis pertahanan, juga terjadi, dan dalam jumlah yang cukup besar. Di periode tahun 2001-2004, transaksi artikel dan servis pertahanan untuk Taiwan mencapai 3,7 milyar dolar, dan pada periode 2005-2008 senilai 3,9 milyar dolar AS.²⁹

²³ Robert Ross, “Navigating the Taiwan Strait...”

²⁴ Alexander G Chanock, “Explaining the Continuities and Changes in United States Policy in Relation to Taiwan for the Past Three Presidents”, CMC Senior Theses, 2010, Paper 38.

²⁵ ABC News, “President Bush Discusses His First 100 Days in Office,” April 25, 2001.

²⁶ James C. P. Chang, U.S Policy Toward Taiwan, <http://www.wcfia.harvard.edu/fellows/papers/2000-01/chang.pdf>, diakses tanggal 07/12/2011.

²⁷ Kerry Dumbaugh, *Taiwan: Texts of the Taiwan Relations Act, the U.S. - China Communiques, and the "Six Assurances"*, Congressional Research Service. Diakses melalui http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs695/m1/1/high_res_d/96-246f_1998May21.pdf, tanggal 10/12/2011.

²⁸ Helene Cooper, “U.S. Approval of Taiwan...”

²⁹ Shirley A. Kan, *Taiwan: Major U.S. Arms Sales Since 1990*, Congressional Research Service, diakses melalui <http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL30957.pdf> tanggal 10/12/2011.

Persekutuan AS-Taiwan tidak hanya terlihat dari angka transfer persenjataan semata, tetapi juga kerjasama militer yang erat. Pada tahun 1999-2003, AS mengirimkan tim untuk meneliti kapabilitas pertahanan angkatan udara dan angkatan laut Taiwan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil seperti adanya permasalahan dalam kemampuan untuk bertahan dari serangan misil balistik dan diperlukannya radar bawah laut serta kapal selam untuk menunjang angkatan laut Taiwan. Kerja sama lebih lanjut dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Taiwan, pada tahun 2007-2009, melalui kerangka *Joint Defense Capabilities Assessment* (JDCA), dengan bantuan AS, untuk menentukan keperluan pertahanan Taiwan.³⁰

Komitmen AS dalam upaya melindungi Taiwan dari kebijakan unilateral China dalam proses unifikasi terlihat dalam krisis yang terjadi di selat pada tahun 1995-1996. Krisis dipicu oleh undangan Cornell University kepada Lee Teng Hui. Sebagai respon atas kunjungan Lee tersebut dan untuk memperingatkan Taiwan agar tidak mengambil kebijakan memisahkan diri, RRC menggelar pertunjukkan senjata di selat Taiwan. Konflik memuncak pada bulan April 1996, ketika RRC menggelar pertunjukkan senjata di selat Taiwan. Misil yang ditembakkan ke selat Taiwan meledak tidak jauh dari daratan. AS merespon tindakan Beijing dengan mengirimkan dua kapal perang induk, USS Independence dan USS Nimitz ke selat Taiwan. Kebijakan AS ini merupakan bukti serta komitmen kuat AS atas payung perlindungan yang diberikan kepada Taiwan. Hal ini dilakukan AS untuk mempertahankan mitra strategis dari ancaman militer di masa datang.³¹ Keberhasilan strategi deterens tersebut tidak terlepas dari kapabilitas militer yang dimiliki AS. Jika dibandingkan secara langsung dengan China, kapabilitas militer AS masih terlampaui jauh untuk dikejar.

Bagi sebagian realis, status Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara superpower masih tidak terbantahkan. Seperti yang diungkapkan oleh Robert Jervis di dalam forum interaktif Theory Talks, "*As a Realist, the only condition under which I see American hegemony end is when another state reaches the power of the US – without that, there just isn't a challenger. I don't like this, but despite all the internal problems the US faces right now, I just don't see any challenger rising soon.*"³²

Klaim Jervis tersebut diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh Global Fire Power (GFP). GFP meletakkan AS sebagai negara yang menduduki peringkat pertama dalam hal kemampuan militer, disusul oleh Rusia di tempat ke dua dan RRC di tempat ke tiga. GFP menggunakan delapan indikator dalam menetapkan peringkat tersebut, antara lain: personel militer, kekuatan angkatan darat, kekuatan angkatan udara, kekuatan angkatan laut, sumber daya alam, logistik, keuangan (bujet pertahanan, dll), dan geografi.³³

Tabel 1. Perbandingan Kapabilitas Militer AS dan RRC³⁴

US MILITARY POWER				CHINA MILITARY POWER	
Personnel				Personnel	
Total	Population:	313,232,044	Total Population:	1,336,718,015	
Available Manpower: 145,212,012			Available Manpower: 749,610,775		
Fit	for	Service:	120,022,084	Fit for Service:	618,588,627
Of	Military	Age:	4,217,412	Of Military Age:	19,538,534
Active	Military:	1,477,896	Active Military:	2,285,000	
Active Reserve: 1,458,500			Active Reserve: 800,000		

³⁰ Ibid.

³¹ Robert S. Ross, "The 1995-1996 Taiwan Strait ...", hlm. 87-123.

³² <http://www.theory-talks.org/2008/07/theory-talk-12.html>. Diakses tanggal 05/12/2011.

³³ <http://www.globalfirepower.com/>, diakses tanggal 04/11/2011.

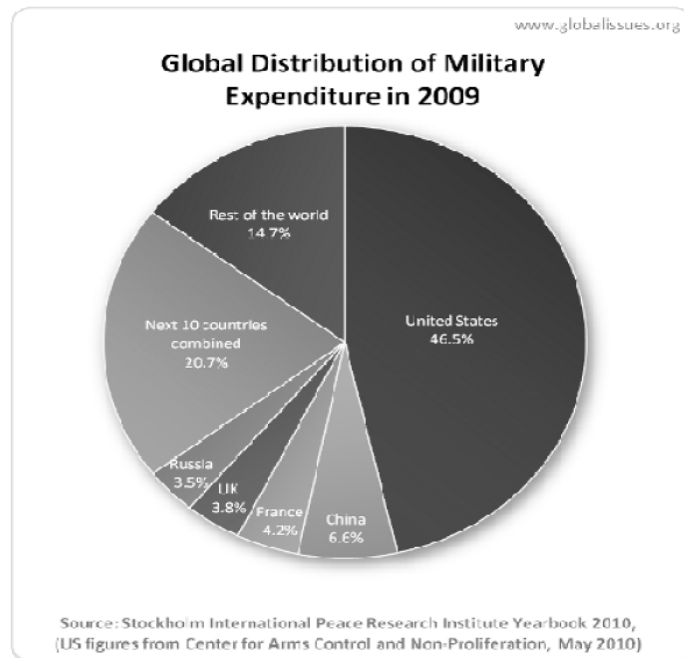
³⁴ http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=United-States-of-America, dan http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=China, diakses 04/11/2011.

<p>Land Army Total Land Weapons: 56,269 Tanks: 9,573 APCs / IFVs: 26,653 Towed Artillery: 2,163 SPGs: 950 MLRSs: 1,430 Mortars: 7,500 AT Weapons: 8,000 AA Weapons: 2,106 Logistical Vehicles: 267,247</p>	<p>Land Army Total Land Weapons: 22,795 Tanks: 7,470 APCs / IFVs: 5,000 Towed Artillery: 2,950 SPGs: 2,475 MLRSs: 2,600 Mortars: 1,050 AT Weapons: 1,250 AA Weapons: 750 Logistical Vehicles: 5,850</p>
<p>Air Power Total Aircraft: 18,234 [2011] Helicopters: 6,417 [2011] Serviceable Airports: 15,097 [2011]</p>	<p>Air Power Total Aircraft: 4,092 Helicopters: 1,389 Serviceable Airports: 502</p>
<p>Resources Oil Production: 9,056,000 bbl/Day Oil Consumption: 18,690,000 bbl/Day Proven Reserves: 19,120,000,000 bbl/Day</p>	<p>Resources Oil Production: 3,991,000 bbl/Day Oil Consumption: 8,200,000 bbl/Day Proven Reserves: 20,350,000,000 bbl/Day</p>
<p>Logistical Labor Force: 154,900,000 Roadway Coverage: 6,506,204 km Railway Coverage: 226,427 km</p>	<p>Logistical Labor Force: 780,000,000 Roadway Coverage: 3,860,800 km Railway Coverage: 86,000 km</p>
<p>Financial (USD) Defense Budget: \$692,000,000,000 Reserves of Foreign Exchange & Gold: \$150,000,000,000 Purchasing Power: \$14,660,000,000,000</p>	<p>Financial (USD) Defense Budget: \$100,000,000,000 Reserves of Foreign Exchange & Gold: \$2,662,000,000,000 Purchasing Power: \$10,090,000,000,000</p>
<p>Geographic Waterways: 41,009 km Coastline: 19,924 km Square Land Area: 9,826,675 km Shared Border: 12,034 km</p>	<p>Geographic Waterways: 110,000 km Coastline: 14,500 km Square Land Area: 9,596,961 km Shared Border: 22,117 km</p>
<p>Naval Power Total Navy Ships: 2,384 Merchant Marine Strength: 418 Major Ports & Terminals: 21 Aircraft Carriers: 11 Destroyers: 59 Submarines: 75 Frigates: 30 Patrol Craft: 12 Mine Warfare Craft: 14 Amphibious Assault Craft: 30</p>	<p>Naval Power Total Navy Ships: 562 Merchant Marine Strength: 2,010 Major Ports & Terminals: 8 Aircraft Carriers: 0 Destroyers: 26 Submarines: 55 Frigates: 58 Patrol Craft: 937 Mine Warfare Craft: 391 Amphibious Assault Craft: 544</p>

Selain *Global Fire Power* beberapa organisasi penelitian lain juga melakukan penghitungan kekuatan militer negara-negara di dunia. Salah satunya yang dilakukan oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). SIPRI menggunakan besaran

anggaran belanja militer sebagai indikator utama. Berturut-turut anggaran militer AS mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2002 sampai tahun 2010. Pada tahun 2002 anggaran mencapai angka US\$ 356.720 milyar, dan terus meningkat dua kali lipatnya hingga US\$ 698.281 milyar pada tahun 2010. Sedangkan anggaran belanja RRC sebesar 262 triliyun yuan pada tahun 2002, dan meningkat empat kali lipat pada tahun 2010 menjadi sebesar 808 triliyun yuan.³⁵ Besaran anggaran belanja militer AS masih terlampau jauh untuk dikejar oleh RRC. Besaran belanja AS enam kali lebih banyak dari pada RRC.

Gambar 1. Distribusi belanja militer global



Graph 7.0

xcii

Dengan kekuatan militer seperti itu, AS akan dapat dengan mudah melakukan serangan pertama maupun bertahan terhadap musuh. Dengan kekuatan udara, darat dan laut, pasukan AS dapat mencapai target secara mendalam, disertai dengan ketepatan persenjataan modern, yang bisa dengan cepat menyerang dan menghancurkan target. Pasukan AS bahkan dapat dengan mudah melakukan kerusakan besar kepada transportasi, jaringan komunikasi, dan infrastruktur ekonomi suatu negara.³⁶ Tentara Nasional China bukannya tidak sadar terhadap kemampuan militer AS ini. People's Liberation Army (PLA/Tentara Nasional China) sadar betul bahwa dengan kemampuan superior jarak jauh dan persenjataan dengan akurasi tinggi, AS dapat mengobarkan perang meskipun musuhnya berada di luar jangkauan. PLA berasumsi bahwa peperangan dengan Taiwan beresiko tinggi. Instalasi militer – termasuk lapangan udara, pesawat tempur, radar, kontrol komando – masyarakat sipil, juga infrastruktur militer sangat rentan terhadap serangan mematikan rudal jelajah jarak jauh dan pesawat tanpa awak yang sangat akurat dalam membidik

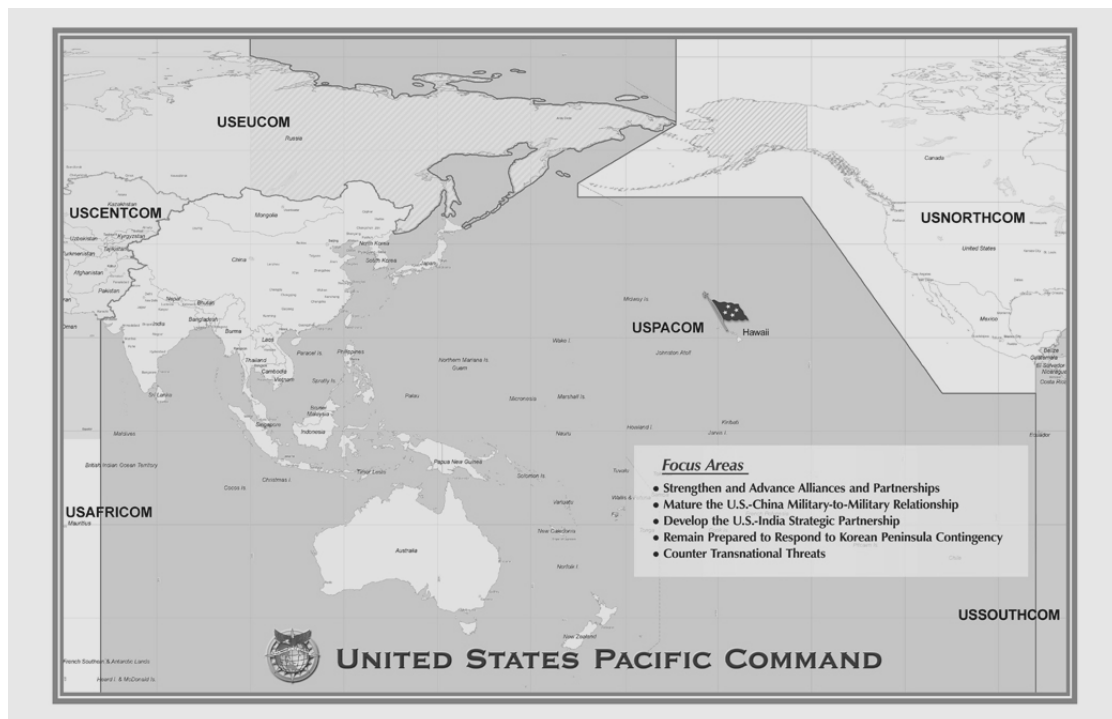
³⁵ Data diambil dari website resmi SIPRI, <http://www.sipri.org/>. Jika satu dolar AS diasumsikan sebesar 6,3 yuan, maka pada tahun 2002 anggaran belanja militer RRC setara dengan US\$ 41,58 milyar, dan US\$ 128,25 milyar pada tahun 2010.

³⁶ Barry R. Posen, *U.S. Military Power: Strong Enough to Deter all Challenges?*, Massachusetts Institute of Technology, diakses melalui http://web.mit.edu/cis/pdf/Audit_5_05_Posen.pdf, tanggal 1/12/2011.

sasaran. AS menggunakan senjata tersebut dalam operasi di Irak, Serbia dan Afghanistan.³⁷ Kekuatan militer ini diperkuat dengan keberadaan Komando Pasifik AS (USPACOM) di wilayah Asia Pasifik.

USPACOM adalah satu dari enam Komando Tempur Gabungan Angkatan Bersenjata AS. Komando Pasifik didukung oleh empat komponen komando: Armada Pasifik AS, Angkatan Udara Pasifik AS, Angkatan Darat Pasifik AS, dan Korps Marinir AS Pasifik. Keempat komando ini bermarkas di Hawaii dan memiliki angkatan yang ditempatkan dan disebar di seluruh kawasan.³⁸ Jumlah personel militer dan sipil AS yang ditugaskan di USPACOM kira-kira sebesar 325.000, atau sekitar seperlima dari kekuatan militer AS. Armada Pasifik AS mencakup lima grup kapal induk pesawat udara, yang terdiri dari 180 kapal, 1.500 pesawat udara dan 100.000 personel. Untuk Korps Angkatan Marinir, Komando Pasifik memiliki sekitar dua pertiga kekuatan tempur Korps Marinir AS, mencakup dua Angkatan Khusus Marinir dan menugaskan sekitar 85.000 personel. Sedangkan Angkatan Udara Pasifik AS terdiri dari kurang lebih 40.000 penerbang dan lebih dari 300 pesawat, dengan 100 pesawat tambahan yang ditugaskan di Guam. Meskipun sebagian besar wilayah Pasifik terdiri dari lautan Komando Pasifik juga diperkuat oleh Angkatan Darat Pasifik AS yang memiliki 60.000 personel aktif, termasuk lima brigade Stryker.³⁹

Gambar 2. Wilayah Tanggung Jawab USPACOM



Keberadaan Komando Pasifik AS menjadi sangat besar pengaruhnya bagi RRC, karena secara eksplisit PACOM menaruh perhatian yang cukup besar atas perkembangan

³⁷ Robert S. Ross, "The 1995-1996 Taiwan Strait ..."

³⁸ http://www.pacom.mil/web/Site_Pages/USPACOM/Facts.shtml, diakses tanggal 29/11/2011.

³⁹ Sebagai catatan, jumlah personel komponen komando memiliki lebih dari 1.200 personel Operasi Khusus. Staf Sipil dan Kontraktor Departemen Pertahanan di Wilayah Tanggung Jawab Pasifik ada sekitar 40.000 orang. Selain itu Pasukan Penjaga Pantai AS (U.S. Coast Guard), yang sering kali mendukung angkatan militer AS di kawasan ini, memiliki sekitar 27.000 personel di Wilayah Pasifik, *Ibid.*

RRC. Pada bulan Oktober 1983 wilayah tanggung jawab USPACOM bertambah yakni: Republik Rakyat China (RRC), Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara), Mongolia, dan Republik Madagaskar.⁴⁰ Di samping itu, di dalam pedoman strategis bagian metode, tercatat bahwa PACOM berkonsentrasi pada lima bidang fokus, yakni: Negara Sekutu dan negara Mitra, Tiongkok (RRC),⁴¹ India, Korea Utara, dan Ancaman Lintas Negara. Berikut merupakan bidang fokus yang tercatat di dalam pedoman strategis USPACOM pasal dua yaitu memantapkan Hubungan Antar Militer A.S.-Tiongkok: (i) Memelihara hubungan antar militer yang konsisten demi mencegah terjadinya salah komunikasi dan salah perhitungan.ii. Mengejar kesempatan untuk meningkatkan kerjasama militer di bidang-bidang yang memiliki kepentingan bersama, (iii) Memantau program modernisasi militer Tiongkok dan melakukan persiapan sejalan dengannya.⁴²

Strategi Defensif China

Secara eksplisit dalam *National Defense Policy* tahun 2008, China menyatakan bahwa kebijakan pertahanannya murni defensif.⁴³ Lebih lanjut China menyebut strategi militernya sebagai pertahanan aktif, yaitu mematuhi prinsip-prinsip operasi defensif, *self defense*, dan menyerang apabila telah diserang terlebih dahulu oleh musuh. Selain itu, China juga memastikan tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang pertama kali, mengejar strategi nuklir *self-defensive* dan tidak akan masuk di dalam perlombaan senjata nuklir dengan negara lain.⁴⁴ Secara spesifik berkaitan dengan permasalahan reunifikasi Taiwan, China menyinggung secara eksplisit berlanjutnya penjualan senjata AS kepada Taiwan. China menganggap bahwa kebijakan AS tersebut tidak hanya menciderai tiga Sino-US *communiqué*, tetapi juga menciderai perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan. Meskipun begitu, China tetap berkomitmen untuk tetap menjunjung tinggi perdamaian dan kerjasama antar negara:

*“At the same time, it will persist in pursuing the new security concept featuring mutual trust, mutual benefit, equality and coordination, and advocating the settlement of international disputes and hotspot issues by peaceful means. It will encourage the advancement of security dialogues and cooperation with other countries, oppose the enlargement of military alliances, and acts of aggression and expansion. China will never seek hegemony or engage in military expansion now or in the future, no matter how developed it becomes.”*⁴⁵

Alih-alih akan menggunakan kebijakan koersif, seperti yang kerap dikhawatirkan oleh AS, untuk menangani permasalahan Taiwan, China memilih untuk menggunakan pilihan yang berseberangan. Beijing memilih untuk meningkatkan *mutual trust* di bidang politik, menyelenggarakan dialog dan konsultasi, serta mewujudkan kesepakatan pertukaran surat, transportasi dan perdagangan, sebagaimana meningkatnya hubungan ekonomi dan finansial di antara China dan Taiwan.⁴⁶ Sekali lagi, dalam China's National Defense tahun 2010, selain

⁴⁰ http://www.pacom.mil/web/site_pages/uspacom/history.shtml, diakses tanggal 29/11/2011.

⁴¹ Kata-kata bercetak tebal berasal dari penulis. Penggunaan cetak tebal dimaksudkan sebagai penegasan perhatian AS terhadap RRC.

⁴² http://www.pacom.mil/web/pacom_resources/pdf/PACOM%20Strategy%20Sep%202010.pdf. Dikases 4/11/2011.

⁴³ “China's National Defense in 2008”, Information Office of the State Council of the People's Republic of China January 2009, Beijing.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ “China's National Defense in 2010”, Information Office of the State Council of the People's Republic of China

Mar. 31, 2011.

menerapkan strategi defensif dan hanya menyerang ketika diserang terlebih dahulu, China menekankan tidak akan mengejar hegemoni, serta tidak akan menggunakan pendekatan militer ekspansif sekarang atau di masa depan.⁴⁷

Meskipun begitu, China tidak akan segan untuk menggunakan serangan militer apabila Taiwan mendeklarasikan kemerdekaannya. Bagi Beijing, Taiwan merupakan bagian dari China, sehingga jika hal itu terjadi akan menjadi pukulan telak bagi persatuan nasional China. Meskipun tetap mengutamakan pendekatan yang damai, namun para pemimpin China tidak bisa berjanji untuk tidak menggunakan serangan militer jika Taiwan bersikukuh ingin merdeka. Hal itu nampak pada pernyataan Deng Xiaoping,

*" We strive for a peaceful solution to the Taiwan issue, but would never rule out the option of force. We cannot make such a promise. What if the Taiwan regime never negotiates with us, what shall we do? Could it be said that we should then give up national reunification? We must remember this. Our next generation must remember this. This is a strategic consideration."*⁴⁸

Kedua negara, AS dan China, berusaha untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengancam keamanan masing-masing di masa depan. China dan AS paham bahwa kepentingan nasional mereka yang terbaik saat ini adalah dengan menghindari konfrontasi secara langsung. Keduanya mengejar kebijakan paralel yang pragmatis dan sama-sama mengikat satu sama lain.⁴⁹ Meskipun begitu, baik AS maupun China, telah bersiap untuk berperang satu sama lain, dalam konteks Taiwan. Oleh sebab itu, Beijing secara serius meningkatkan kekuatannya, dan berusaha menjadi kekuatan dominan di Asia. Dalam *Beijing's defense white papers* terdapat indikasi yang jelas bahwa prinsip modernisasi China didesain untuk menangkalkan kemungkinan konfrontasi dengan AS. Kekuatan militer yang sedang dalam fokus pengembangan oleh Beijing adalah kekuatan angkatan laut. Kekuatan angkatan laut China didukung oleh kapal selam dengan kekuatan misil balistik nuklir (SSBN) kelas baru (094) dan diperkuat dengan 12 JL-2 kapal selam bersenjata misil balistik (SLBM). SSBN yang baru akan melengkapi DF-31 dan DF-31A ICBMs (*Intercontinental Ballistic Missiles*) yang sedang dipersiapkan untuk disebarkan di masa depan. Senjata baru ini memiliki karakteristik lebih cepat, akurat dan bertahan daripada DF-5A ICBMs yang dipergunakan oleh China saat ini. Dengan kekuatan maritim seperti itu, China memiliki kemampuan *second strike* dan mempertahankan kedaulatannya baik di darat maupun di lautan.⁵⁰

Beberapa pengamat beranggapan bahwa modernisasi angkatan laut China disebabkan oleh krisis di selat Taiwan pada tahun 1996-1997, yang memancing dua kapal induk AS mendekat ke perairan tersebut. Modernisasi angkatan laut China diduga kuat sangat dipengaruhi oleh isu Taiwan, seperti yang dilaporkan oleh Departemen Pertahanan AS. Departemen Pertahanan AS yakin bahwa China ingin militernya memiliki kemampuan untuk menangkalkan intervensi AS dalam hal konflik dengan Taiwan. Paling tidak China memiliki kemampuan untuk menunda atau mengurangi efektivitas dari intervensi angkatan laut dan udara AS.⁵¹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Office of Taiwan Affairs of the Chinese Communist Party Central Committee and Taiwan Affairs Office of the State Council, dikutip dalam Yong Deng, *China's Struggle for Status...*, hlm. 259.

⁴⁹ Paul H. B. Godwin, China as A Major Asian Power: The Implication of Its Military Modernization (a view from the United States) dalam Evelyn Goh and Sheldon W. Simon (Ed.), *China, the United States, and Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, and Economics*, New York: Routledge, 2008, hlm. 145-163.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ronald O'Rourke, China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and

Strategi deterens yang dilancarkan oleh AS melalui Taiwan Relations Act merupakan faktor utama dalam memahami segitiga hubungan antara AS, China dan Taiwan. Di dalam TRA tercantum secara eksplisit bahwa AS menginginkan “*masa depan Taiwan akan ditentukan oleh cara-cara damai; menganggap bahwa usaha-usaha yang menentukan masa depan Taiwan, selain cara-cara damai, termasuk boikot atau embargo, merupakan ancaman keamanan dan perdamaian bagi negara-negara Pasifik Barat dan menjadi perhatian penting bagi AS.*” Hal ini berarti, pemilihan kebijakan koersif dalam upaya reunifikasi Taiwan oleh China akan memiliki dampak langsung dengan AS. Beijing telah merasakan bagaimana eratnya hubungan AS-Taiwan – yang dikerangkai oleh TRA – sewaktu terjadi ketegangan di selat Taiwan pada tahun 1995-1996. Dikirimnya dua kapal induk AS ke Selat Taiwan membuktikan bahwa TRA bukanlah perjanjian main-main. Hal tersebut juga membuktikan bahwa komitmen AS untuk melindungi Taiwan dari tindakan unilateral China untuk reunifikasi sangatlah kuat. Komitmen ini masih terjaga untuk mempertahankan kredibilitas AS dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Timur. Sebagai “penjamin” (guarantor) keamanan dan perimbangan kekuatan Asia Timur, Amerika Serikat tetap mempertahankan aliansi dan kehadiran militernya di kawasan ini.⁵²

Dalam *National Defense Strategy* tahun 2008, AS memberikan perhatian khusus terhadap modernisasi militer China, yang secara khusus ditujukan kepada kemungkinan konflik dengan Taiwan. Berkaitan dengan hal itu, Departemen Pertahanan AS, “*will respond to China’s expanding military power, and to the uncertainties over how it might be used, through shaping and hedging.*”⁵³ Sedangkan di dalam *National Security Strategy* tahun 2010, AS akan terus memonitor program modernisasi militer China dan bersiap untuk memastikan bahwa kepentingan dan sekutu-sekutunya, dalam lingkup regional atau global, tidak terkena dampak negatif dari program China tersebut.⁵⁴

Dalam *Cooperation Under Security Dilemma*, Robert Jervis mengatakan, “*jika defensif lebih menguntungkan daripada ofensif, maka lebih mudah untuk mempertahankan daripada maju, menghancurkan dan mengambil.*” Lebih lanjut menurut Jervis, “*When the defense has the advantage... The state that fears attack does not pre-empt-since that would be a wasteful use of its military resources-but rather prepares to receive an attack.*” Inilah yang membuat China lebih memilih strategi defensif, yakni tetap mempertahankan status quo di Selat Taiwan. Penggunaan serangan militer untuk memaksa Taiwan bersatu kembali dengan China sangatlah beresiko dan berbiaya tinggi. Pemahaman terhadap keuntungan dari strategi bertahan, membuat Beijing lebih memilih untuk menahan serangan ke Taiwan dan mempersiapkan untuk menerima serangan terlebih dahulu – baik dari Taiwan maupun AS – semenjak China memiliki kemampuan *second strike*.

Pertimbangan kekuatan militer AS menjadi salah satu pertimbangan utama, mengapa China lebih memilih strategi defensif daripada ofensif. Komitmen AS untuk melindungi Taiwan – termanifestasi dalam Taiwan Relations Act – merupakan sinyal kuat bagi Beijing bahwa serangan terhadap Taiwan berarti juga serangan terhadap AS. Dengan kata lain, China tidak hanya berhadapan dengan militer Taiwan semata, tetapi juga kekuatan militer AS. Kuatnya pengaruh militer AS di kawasan Asia-Pasifik merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh Beijing. Sebanyak 325.000 pasukan AS atau seperlima dari total keseluruhan, ditempatkan di bawah Komando Pasifik. Salah satu dari empat komponen

Issues for Congress (Congressional Research Service: 23 December 2009). Diakses melalui <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf>, tanggal 30 Januari 2012.

⁵² C. Fred Bergsten (et al.), *China’s rise : Challenges and Opportunities*, Washington D.C: Peterson Institute for International Economics and CSIS, 2008, hlm. 169-187.

⁵³ *National Defense Strategy*, 2008.

⁵⁴ *National Security Strategy*, 2010, hlm. 43

komando Pasifik AS yakni Armada Pasifik mencakup lima grup kapal induk, yang terdiri dari 180 kapal tempur, 1.500 pesawat udara dan 100.000 personel.

People's Liberation Army (PLA/Tentara Nasional China) sadar betul bahwa dengan kemampuan superior jarak jauh dan persenjataan dengan akurasi tinggi, AS dapat mengobarkan perang meskipun musuhnya berada di luar jangkauan. PLA berasumsi bahwa peperangan dengan Taiwan beresiko tinggi. Instalasi militer – termasuk lapangan udara, pesawat tempur, radar, kontrol komando – masyarakat sipil, juga infrastruktur militer sangat rentan terhadap serangan mematikan rudal jelajah jarak jauh dan pesawat tanpa awak yang sangat akurat dalam membidik sasaran.⁵⁵ Dengan kekuatan udara, darat dan laut, pasukan AS dapat mencapai target secara mendalam, disertai dengan ketepatan persenjataan modern, yang bisa dengan cepat menyerang dan menghancurkan target. Pasukan AS bahkan dapat dengan mudah melakukan kerusakan besar kepada transportasi, jaringan komunikasi, dan infrastruktur ekonomi suatu negara.⁵⁶

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat China lebih memilih strategi defensif dalam merespon penjualan senjata oleh AS ke Taiwan. Strategi bertahan yang diterapkan oleh China tertuang dalam respon verbal, sanksi penundaan kerjasama militer dan penempatan ratusan misil yang mengarah ke Taiwan. Kondisi ini tidak akan merubah *status quo*, selama tidak ada kepentingan dua kekuatan besar (AS dan China) yang tereliminir: tidak ada deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan (bagi China) dan tidak ada penggunaan serangan militer kepada Taiwan (bagi AS).

Penutup

Dalam artikelnya yang berjudul Kehidupan setelah Pax Amerikana, Charles Kupchan meyakini bahwa salah satu faktor penentu stabilitas di kawasan AsiaTimur adalah Taiwan.⁵⁷ Hal itu disebabkan oleh masih hidupnya *mindset* Perang Dingin Amerika Serikat, dengan terus menggunakan Taiwan sebagai alat untuk mengecek perkembangan China. Strategi deterens AS tersebut memicu strategi deterens tandingan dari China dengan terus melakukan modernisasi militernya. Jika tidak dimaintain dengan baik, maka akan semakin meningkatkan tensi hubungan, baik di antara AS-China, maupun kawasan Asia Timur dan Tenggara secara umum.

Pengambilan strategi defensif China, berdasarkan *offense-defense balance*, disebabkan oleh variabel *defense has advantage*. Oleh sebab itu, China lebih memilih untuk mempertahankan *status quo* daripada maju, menghancurkan dan melakukan reunifikasi secara paksa dengan Taiwan. Pengalokasian dana untuk bertahan jauh lebih murah, daripada untuk menyerang. Akan tetapi teori *offense-defense* merupakan teori yang dinamis. Meskipun termasuk dalam varian realisme defensif, yang berasumsi bahwa negara di dalam sistem internasional selalu mencari keamanan (*security maximizer*), akan tetapi jika menyerang menguntungkan, maka negara akan lebih memilih untuk menyerang daripada bertahan, begitu juga dengan China. Menyerang akan lebih menguntungkan bagi China daripada bertahan jika kapabilitas militernya sama atau melampaui kapabilitas militer AS, sehingga kemungkinan untuk menang dalam peperangan semakin besar.

⁵⁵ Robert S. Ross, "Navigating the Taiwan Strait..."

⁵⁶ Barry R. Posen, "U.S. Military Power: Strong Enough to Deter all Challenges?"

⁵⁷ Charles A. Kupchan, "Kehidupan setelah Pax Amerikana", dalam Samuel P. Huntington et.al (terj.), *Amerika dan Dunia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 265.

Daftar Pustaka

- Bergsten, C. Fred (et.all). 2008. *China's Rise: Challenges and Opportunities*. Washington D.C: Peter G. Peterson Institute for International Economics and the Center for Strategic and International Studies.
- Chang, James C. P., "U.S Policy Toward Taiwan," <http://www.wcfia.harvard.edu/fellows/papers/2000-01/chang.pdf>, diakses tanggal 07/12/2011.
- Chanock, Alexander G. 2010. "Explaining the Continuities and Changes in United States Policy in Relation to Taiwan for the Past Three Presidents". *CMC Senior Theses*. Paper 38.
- China's National Defense in 2008 , Information Office of the State Council of the People's Republic of China January 2009, Beijing.
- China's National Defense in 2010, Information Office of the State Council of the People's Republic of China, Mar. 31, 2011.
- Deng, Yong. 2008. *China's Struggle for Status*. New York: Cambridge University Press.
- Dumbaugh, Kerry, "Taiwan: Texts of the Taiwan Relations Act, the U.S. - China Communiques, and the "Six Assurances", *Congressional Research Service*. Diakses melalui http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs695/m1/1/high_res_d/96-246f_1998May21.pdf, tanggal 10/12/2011.
- Godwin, Paul H. B. "China as A Major Asian Power: The Implication of Its Military Modernization (a view from the United States)" dalam Evelyn Goh and Sheldon W. Simon (Ed). 2008. *China, the United States, and Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, and Economics*. New York: Routledge.
- Goh, Evelyn and Simon, Sheldon W (Ed). 2008. *China, The United States, and Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, and Economics*. New York: Routledge.
- Jisi, Wang. 2004. "China's Changing Role in Asia". *Tokyo: Japan Center for International Exchange*. hal. 14. Diakses melalui http://www.jcie.org/researchpdfs/RiseofChina/RiseChina_Wang.pdf, tanggal 15/02/2012.
- Kan, Shirley A., "Taiwan: Major U.S. Arms Sales Since 1990", *Congressional Research Service*, diakses melalui <http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL30957.pdf> tanggal 10/12/2011.
- Keohane, Robert O. 1984. *After Hegemony*. Princeton: Princeton University Press.
- Kupchan, Charles A. "Kehidupan setelah Pax Amerikana" dalam Sammuel P. Huntington et.al (terj). 2005. *Amerika dan Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lai, David. 2010. "Arms Sales To Taiwan: Enjoy The Business While It Lasts". *Of Interest Strategic Studies Institute*, May 3.
- Organski, A.F.K, 1996. "World Politics" dalam John A. Vasquez, *Classics of International Relations*. New Jersey: Prentice Hall.
- O'Rourke, Ronald, "China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities— Background and Issues for Congress", *Congressional Research Service*: 23 December 2009). Diakses melalui <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf>, tanggal 30 Januari 2012.
- Posen, Barry R., "U.S. Military Power: Strong Enough to Deter all Challenges?", *Massachusetts Institute of Technology*, diakses melalui http://web.mit.edu/cis/pdf/Audit_5_05_Posen.pdf, tanggal 1/12/2011.
- Ross, Robert S. "The 1995-1996 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, Credibility, and Use of Force". *International Security* 25:2 (Fall 2000).
- _____. "Navigating the Taiwan Strait: Deterrence, Escalation Dominance, and U.S.-China Relations". *International Security*, Vol. 27, No. 2 (Fall 2002).

- _____, "Bipolarity and Balancing in East Asia" dalam T.V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann (Ed). 2004. *Balance of power : theory and practice in the 21st century* California: Stanford University Press.
- Xuetong, Yan. 2010. "The Instability of China-US Relations", *The Chinese Journal of International Politics*, Vol. 3, 2010.
- Yeh, K. C., "China's Economic Growth: Recent Trends and Prospects" dalam Shuxun Chen and Charles Wolf, Jr. (Ed). 2001. *China, The United States, and The Global Economy* (California: RAND.
- Zhu, Zhiquan. 2006. *US-China Relations In The 21st Century : Power Transition and Peace* New York: Routledge.

Internet:

- NN, *China hits back at US over Taiwan weapons sale*, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8488765.stm>, diakses tanggal 22 Oktober 2010.
- Helene Cooper, *U.S. Approval of Taiwan Arms Sales Angers China*, <http://www.nytimes.com/2010/01/30/world/asia/30arms.html>, diakses tanggal 22 Oktober 2010.
- NN, *China hits back at US over Taiwan weapons sale*, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8488765.stm>, diakses tanggal 22 Oktober 2010.
- Ralph Jennings, *China adding missiles near Taiwan: navy official*, <http://www.reuters.com/article/2010/03/27/us-taiwan-china-idUSTRE62Q0AS20100327>, diakses tanggal 22 Oktober 2010.
- ABC News, "President Bush Discusses His First 100 Days in Office," April 25, 2001
<http://www.theory-talks.org/2008/07/theory-talk-12.html>. Diakses tanggal 05/12/2011.
<http://www.globalfirepower.com/>
<http://www.sipri.org/>
http://www.pacom.mil/web/Site_Pages/USPACOM/Facts.shtml
http://www.pacom.mil/web/site_pages/uspacom/history.shtml
http://www.pacom.mil/web/pacom_resources/pdf/PACOM%20Strategy%20Sep%202010.pdf.